

TATA KELOLA EKONOMI DAERAH KOTA SEMARANG
REGIONAL ECONOMIC GOVERNANCE IN SEMARANG CITY

Maria Goretti Westri Kekalih Susilowati^{1*}
FEB UNIKA Soegijapranata Semarang
E-mail: westrie@unika.ac.id

ABSTRAK

Salah satu tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah dalam kerangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal dengan memaksimalkan potensi lokal adalah hal penting dan perlu diujai guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Secara umum, tujuan penelitian adalah memetakan kondisi tata kelola ekonomi di daerah, dalam konteks kebijakan Pemda yang mengatur aktivitas dunia usaha di daerah berdasarkan kewenangannya. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dunia usaha akan berpengaruh positif bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Kondisi demikian akan mendorong peningkatan peran swasta dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan menggunakan sampel sebanyak 40 perusahaan yang terbagi dalam usaha kecil, menengah dan besar secara proporsional, dan pendekatan analisis deskriptif diketahui bahwa iklim usaha di Kota Semarang sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu infrastruktur, akses lahan dan dukungan pemerintah dalam program pengembangan usaha swasta (PPUS). Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian "Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016" yang dilakukan di 32 Ibukota Provinsi di Indonesia oleh Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD).

Kata kunci: tata kelola ekonomi, investasi, desentralisasi, otonomi daerah

ABSTRACT

One of the main objectives of the decentralization and regional autonomy is to improve local productivity and competitiveness in the framework of improving the quality of life and social welfare. Therefore, strengthening local capacity by maximizing local potential is important and needs to be explored to improve the quality of social welfare by increasing income and providing jobs. Generally, the objective of the study is to map the conditions of regional economic governance in the context of local government policies that regulate business activities according to their authority. The Policies that compliance with the business needs will positively influence towards the creation of a conducive business climate in the region. Such a condition will encourage the increasing role of the private sector in the effort to increase the society's income as well as jobs creation. Using a sample of 40 companies that is divided into small, medium and large businesses, and descriptive analysis approach, it is known that the business climate in Semarang City is good, although there are still some things that need to be improved, such as infrastructure, land access and government support in development programs private enterprise (PPUS). This research is part of a study on "Regional Economic Governance 2016" conducted in 32 Provincial Capitals in Indonesia by the Regional Autonomy Watch (KPPOD).

Keywords: Economic Governance, investment, desentralization, Regional Autonomy

^{1*} FEB Unika Soegijapranata Semarang, westrie@unika.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan utama desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan daya saing produktivitas dan daya saing regional dalam kerangka tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Paradigma pembangunan daerah membutuhkan strategi yang jelas dan tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal dengan memaksimalkan potensi lokal harus diijazahi. Artinya, masyarakat yang tinggal di daerah harus menjadi pelaku utama dalam meningkatkan beberapa komponen daya saing daerah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja yang tinggi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Sektor swasta (pelaku usaha) memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah dengan beberapa nilai tambah output dan penciptaan lapangan kerja, serta berbagai efek multiplier lainnya. Namun, mengacu pada survei Doing Business 2016, Indonesia menempati urutan ke 109 dari 189 ekonomi di dunia - jauh di belakang negara-negara tetangga seperti Thailand di tempat 26, Malaysia di posisi 18, dan Singapura yang sering mencapai posisi teratas (IFC, 2017). Kondisi tersebut disebabkan oleh (1) ada fakta bahwa di daerah dan sektor ekonomi tertentu masih ditemui ekonomi biaya tinggi (World Bank Group, 2016) sehingga daya tarik suatu daerah rendah. Inefisiensi administrasi pemerintah atau inefisiensi dalam praktik birokrasi seperti penegakan hukum dan penegakan perizinan, kompleksitas mekanisme pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur sektoral dan sektoral, dan inkonsistensi peraturan karena tumpang tindih peraturan pusat dengan daerah atau antar sektoral (KPPOD, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu adanya perbaikan terutama pada layanan investasi.

Produktivitas daerah jelas terdiri dari proses interaksi dan sinergi antar pelaku ekonomi yang berada di lingkungan ekonomi daerah, terutama dari unsur pemerintah daerah selaku regulator dan fasilitator, pelaku usaha, dan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investor dalam aktivitas ekonomi telah sangat mempengaruhi produktivitas sektor swasta.

Namun, kebijakan pemerintah daerah ini juga dipengaruhi oleh kewenangan dan peraturan nasional, sehingga pemerintah pusat juga merupakan salah satu penyusun lingkungan ekonomi daerah. Kinerja sektor swasta dalam perekonomian dilihat dari produktivitas dan efisiensi di tingkat mikro perusahaan secara bersama-sama menciptakan produktivitas regional. Dengan memastikan iklim usaha yang sehat/kondusif di kawasan diharapkan dapat mendorong produktivitas ekonomi daerah secara optimal dan membuka jalan menuju kesejahteraan sosial.

Permasalahan

Sejak desentralisasi sekitar 15 tahun yang lalu, terlihat bahwa banyak pemerintah daerah sedang melakukan reformasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan kompetitif dengan memberi penyederhanaan perizinan, pengaturan peraturan, penanganan korupsi, perbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Namun demikian, apakah kebijakan desentralisasi telah secara signifikan mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan yang tinggi? Apakah Tata kelola Ekonomi Daerah mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif?

Tujuan dan Manfaat

Perekonomian harus dikelola dengan baik dan sinergis dengan mengambil prinsip persaingan yang sehat bagi setiap aktor yang terlibat dalam ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh gambaran penilaian kinerja indikator tata kelola ekonomi di Kota Semarang. Sedangkan output dari studi ini karakteristik pemetaan dan rekomendasi tata kelola ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait tata kelola ekonomi daerah dalam merumuskan strategi memperbaiki iklim usaha di kawasan dalam perspektif bisnis.

Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Daerah dan Daya Saing

Pencapaian kesejahteraan sosial di suatu negara akan lebih cepat jika pencapaian nilai tambah berdasarkan daya saing ekonomi. Pada dasarnya, daya saing nasional adalah agregat daya saing daerah, ini berarti daya saing daerah merupakan unit spasial yang penting dalam perekonomian nasional. Indonesia memiliki 542 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi dan 508 kabupaten. Semua daerah otonom ini memiliki potensi alam dan keunggulan komparatif. Di beberapa daerah

bahkan memiliki keunggulan kompetitif yang menjadi tuas ekonomi nasional.

Peningkatan daya saing daerah telah terjadi, namun masih menunjukkan derajat yang rendah (KPPOD, 2017). Kondisi ini tercermin dalam implementasi dan mekanisme 7 elemen desentralisasi, yaitu (i) kewenangan, (ii) kelembagaan, (iii) personil, (iv) keuangan daerah, (v) vi) sistem pelayanan publik, dan (vii) pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal. Porsi desentralisasi yang memadai dan otonomi yang berkualitas merupakan modal bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan dan/atau memaksimalkan unsur-unsur yang ada. Pada gilirannya, pengelolaan elemen-elemen ini juga akan memberikan kontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan daya saing suatu daerah untuk mencapai tujuan pokok pembangunan, kesejahteraan. Sebagai tentang pemerintah Daerah, UU No.32 / 2004 dan amandemennya UU No.23 / 2014 menetapkan pelayanan publik dan daya saing sebagai tolok ukur instrumental untuk mencapai kesejahteraan sosial maksimal.

Tata kelola merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan dan/atau mengoptimalkan fungsi elemen desentralisasi (Urusan Daerah, Kerjasama, Efektivitas Pemerintah Daerah, Regulasi) serta unsur otonomi (Aparatur, Kelembagaan, Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran) dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan daya saing. Pelayanan publik dan daya saing secara bersama-sama akan mempengaruhi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Sementara pada jalur daya saing, kinerja ekonomi Indonesia yang mengesankan saat ini bukan tidak mungkin memudar jika kemudahan berbisnis pada tingkat regional memburuk. Padahal, daya tarik investasi dan pangsa pasar yang mempengaruhi produktivitas terciptanya kesejahteraan dipengaruhi daya saing suatu negara/kawasan. Sementara tu, daya saing Indonesia saat ini yang masih sarat dengan isu "klasik" seperti inefisiensi dan korupsi. Oleh karena itu, tantangan utama bisnis yang lain adalah memperbaiki faktor kelembagaan, infrastruktur dan inovasi teknologi (KPPOD, 2017).

RPJP 2005-2025 mengaskan bahwa tata kelola (kelembagaan) merupakan instrumen penting dalam membangun daya saing (BAPPENAS, 2007). Perbaikan pada tata kelola yang mempengaruhi layanan bisnis dapat mendorong peningkatan investasi, produktivitas dan ekspor sebagai cerminan

penguatan daya saing suatu daerah. Salah satu contoh penting terkait kelembagaan adalah perizinan. Reformasi perizinan dengan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (PTSP) telah menunjukkan angka positif, namun masih terbatas dalam hal efektivitas kinerja. Selain institusi, infrastruktur dan lapangan kerja juga berperan penting dalam berkontribusi terhadap masalah daya saing dan inefisiensi bisnis [khususnya iklim usaha regional] sepanjang era otonomi ini.

Daya saing regional yang meningkat tentu membutuhkan inovasi dan kreativitas yang tumbuh di masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Di sisi lain, penciptaan daya saing regional dengan cepat dicapai melalui terobosan, kebijakan afirmatif, dan sinergi pemangku kepentingan termasuk pemerintah, bisnis dan kewiraswastaan, dan masyarakat madani seperti universitas (akademisi), organisasi masyarakat (organisasi masyarakat sipil), organisasi non-pemerintah komunitas (LSM), dan lain-lain.

Tata Kelola Ekonomi dan Iklim Usaha di Daerah

Konsep tata kelola yang dimaksud dalam penelitian ini mengadopsi definisi (Ilmar, 2014), di mana tata kelola secara hirarkis terdapat adanya hubungan dan posisi antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang berperan dalam penyelenggaraan negara-organisasi. Konsep pengelolaan partisipatif diterapkan dalam tata kelola ekonomi daerah, digunakan sebagai instrumen untuk membangun daya saing serta iklim usaha yang kondusif untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi yakni kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap iklim investasi yang menentukan peluang dan insentif bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha secara produktif. , menciptakan daya saing kerja dan pemberdayaan. Meskipun pemerintah daerah memiliki pengaruh yang terbatas terhadap faktor *endowmen* seperti geografi atau kekayaan alam, namun kebijakan pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam membentuk iklim investasi. Pemerintah jelas memiliki pengaruh terhadap hal keamanan, hak kepemilikan, peraturan bisnis dan perpajakan (baik di luar peraturan dan peraturan), masalah tata kelola yang lebih luas seperti integritas dan korupsi juga menjadi faktor yang juga berpengaruh. Memperbaiki

kebijakan dan perilaku pemerintah yang membentuk iklim investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

McCulloch dan Malesky dalam studinya pada tahun 2010 menganalisis persepsi pelaku usaha di 243 kabupaten di seluruh Indonesia dan menemukan hubungan yang tidak signifikan secara statistik antara tindakan tata kelola dan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah ini (McCulloch & Malesky E, 2010). Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di negara lain dimana ukuran tata kelola memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi daerah lebih dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur yang berkualitas, terutama jalan dan listrik, kepastian hukum/kebijakan, dan masalah akses lahan. Masalah perizinan, program pengembangan usaha, dan pengumpulan dan retribusi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa meningkatnya beban belanja negara/ daerah untuk mendanai program reformasi birokrasi tidak sebanding dengan kenaikan manfaat masyarakat yang dirasakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai input utama dan data-data sekunder sebagai data pendukung. Data primer berupa persepsi pelaku usaha yang diperoleh dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur (kuesioner) yang disusun sistematis. Responden diambil secara acak dan representatif, sehingga data yang terisi kuesioner adalah data yang memiliki nilai objektivitas tinggi sesuai dengan pengetahuan / pemahaman/kepercayaan individu tentang objek sikap (kognitif) karena pengalaman, aktivitas (pekerjaan) atau menghadapi masalah yang diteliti. Adapun, variabel yang akan dinilai atau dipersepsikan adalah

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic random sampling* atau *systematic sampling*. *Systematic sampling* adalah sistem sampling dimana setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden dengan sebelumnya responden dikelompokkan menurut kategori tertentu (Imam Ghozali, 2012; Imam Gozali, 2006). Dalam hal

ini, responden dikelompokkan menurut skala usaha, yakni skala usaha mikro, kecil, menengah, besar (mengacu pada jumlah tenaga kerja di perusahaan; mikro (<5 tenaga kerja), kecil (5 – 19 tenaga kerja), menengah (20 – 99 tenaga kerja), besar (\geq 100 tenaga kerja) (www.bps.go.id).

Langkah selanjutnya adalah menggunakan bola salju, yang merupakan metode terakhir yang digunakan, jika tidak ada responden lagi. Penggunaan metode snowballing digunakan untuk mencari pengganti responden dengan mempertimbangkan kesesuaian jenis dan skala usaha utama responden untuk diganti.

Untuk tujuan tersebut telah disediakan daftar semua perusahaan/pengusaha di daerah penelitian. Jumlah target sampel untuk pelaku usaha adalah 40 orang (perusahaan). Tahapan dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut: 1) Menyediakan daftar pengusaha/perusahaan yang diperoleh dari data Survei Ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS. 2) Mengklasifikasikan pengusaha/perusahaan berdasarkan skala dan jenis usaha. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan skala usaha yaitu Kecil, Menengah dan Besar. Selain itu, data perusahaan juga diklasifikasikan menurut jenis usaha yaitu industri, Jasa dan Perdagangan, dan 3) Menentukan interval sebagai dasar sampling.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif (survei dan wawancara mendalam) dan analisis kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan satu dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah. Topografi Kota Semarang terletak pada 6050' - 7010' Lintang Selatan dan 109035' - 110050' Bujur Timur dengan ketinggian tanah \pm 0,75 sampai \pm 348,00 m di atas laut. Secara administratif, Semarang yang terdiri 16 kecamatan memiliki luas wilayah 373,70 atau 2,74 persen dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi (4.269 orang per KM²). Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Semarang Selatan dengan kepadatan 13.431 orang per KM², kecamatan Candisari dengan kepadatan 12.119 orang per KM² dan urutan berikutnya adalah kecamatan Gayamsari dengan kepadatan 12.009 orang per KM². Sedangkan kecamatan

dengan tingkat kepadatan terendah adalah kecamatan Tugu dengan kepadatan 1.005 orang per KM², diikuti oleh Mijen dengan kepadatan 1.067 orang per KM² (semarangkota.bps.go.id)

Secara ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan Kota Semarang sebesar 6,09 persen per tahun selama tahun 2011-2015. Pertumbuhan PDRB dengan harga konstan mencerminkan adanya peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Artinya, ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat semakain banyak. Peningkatan ketersediaan barang dan jasa dapat diharapkan untuk mengimbangi kenaikan daya beli masyarakat. Dengan demikian, meski terjadi peningkatan sisi permintaan, hal itu tidak menjadi pemicu terjadinya inflasi tinggi. Tiga sektor penyumbang terbesar PDRB Kota Semarang adalah sektor Manufaktur, Konstruksi dan Penjualan Ritel dan Ritel, Perbaikan, dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor.

Profil Responden dan Perusahaan.

Target responden dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap memiliki kompetensi dalam aktivitas usaha dalam perusahaan, yakni mereka yang memiliki jabatan pemilik, direktur, manajer dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 75,65% responden dalam penelitian ini adalah pemilik, 20,00 % direktur dan 4,35% yang lain adalah manajer. Sementara itu, berdasarkan jenis kalamannya, sebagian besar responden dalam penelitian ini laki-laki (60.87%), memiliki pengalaman mengelola usaha lebih dari 20 tahun dengan tingkan pendidikan SMA.

Mengenai karakteristik perusahaan, sebagian besar perusahaan berbentuk usaha perorangan dalam bentuk PD dan UD dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang atau termasuk dalam kategori usaha kecil. Konsisten dengan skala usaha tersebut, dilihat dari sisi sumber modal, sebagian besar responden menyatakan bahwa modal bersasal dari investor lokal dan hanya sebagian kecil yang menyatakan modal berasal dari swasta nasional luar daerah. Tidak terdapat satu perusahaan pun yang memiliki sumber dana dari investor asing. Dilihat dari sektor usahanya, penelitian ini mencakup beberapa sektor usaha, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari seluruh responden, sebanyak

52,17% perusahaan memiliki wilayah pemasaran hanya sebatas pada kelurahan/desa yang sama dengan tempat, 30,34% memiliki wilayah pemasaran dalam satu kecamatan, 8,70% dalam kabupaten dan 8,70% lainnya luar Kabupaten bahkan luar provinsi.

Perizinan Usaha dan Biaya Transaksi

Perizinan usaha merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh pengusaha memulai usaha. Perizinan dapat menjadi insentif maupun disinsentif utk memulai usaha. Perizinan yang tidak berbelit-belit dan murah akan menjadi insentif untuk memulai usaha dan sebaliknya. Terkait dengan beberapa perizinan dasar (TDP, SIUP, TDI, IUI), penelitian ini menunjukkan bahwa waktu resmi pengurusan perizinan adalah antara 3 – 5 hari dengan biaya 0 (nol Rupiah). Waktu resmi juga merupakan waktu yang ditetapkan oleh biro kepada kliennya). Sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya waktu resmi tersebut cenderung terpenuhi, meskipun terdapat beberapa responden yang memerlukan waktu tambahan satu hari. Demikian juga dengan biaya pengurusan izin. Jika mengurus sendiri, pengusaha tidak dibebani biaya pengurusan izin, namun mereka yang menggunakan jasa biro akan terkena biaya jasa biro antara Rp25.000.00 – Rp50.000.00.

Masih terkait dengan persepsi pengusaha mengenai perizinan, proses perizinan untuk memulai usaha cenderung dipersepsikan baik dan sangat baik. Hal tersebut tercermin pada arah jawaban responden yang tersaji pada tabel 1. Penelusuran pada implementasi pelayanan perizinan, beberapa jenis perizinan dapat dilakukan secara on line yang dapat diakses di <http://dpmpstsp.izin.semarangkota.go.id>.

Tabel 1 Persepsi Proses Perizinan

	Setuju	Sangat Setuju
Efisien	4.55	95.45
Bebas Pungutan	47.06	52.94
Bebas Kolusi	46.67	53.33

Sumber: Data rimer

Sementara itu, mengenai berbagai sumber informasi perizinan dapat dilihat pada tabel 2. Dengan melihat tabel 2 tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki banyak sumber informasi terkait dengan perizinan. Biasanya, mereka tidak hanya menggunakan satu sumber informasi saja tetapi memperoleh dari beberapa sumber. Dari berbagai sumber informasi tersebut, sumber informasi yang

paling efektif karena paling banyak diakses adalah situs pemda dan petugas pemda di pelayanan perizinan non PTSP. Berbagai informasi perizinan yang disediakan dalam situs pemda antara lain alur perizinan, informasi jenis perizinan, perizinan on line, tracking perizinan, aktivitas proses perizinan dan kalkulator. Ketersediaan kalkulator yang telah diprogram dengan formula dapat digunakan untuk melakukan simulasi perhitungan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga berapa biaya perizinan IMB yang dibebankan bersifat *self assesment*.

Tabel 2 Sumber Informasi Perizinan

Sumber Informasi	Tidak Setuju	Setuju
Situs Pemda	5.56	94.44
Brosur yg dikirim	10.53	89.47
Papan/Brosur di kantor pemda	20.00	80.00
petugas Pemda di PTSP	16.67	83.33
Petugas Pemda di perizinan non PTSP	5.56	94.44
Teman yg pegawai	27.78	72.22
Teman bukan Pegawai	90.48	9.52
pihak ketiga	33.33	66.67
Asosiasi	11.11	88.89
Kolega	11.11	88.89
media masa lokal	84.21	15.79

Sumber: Data primer.

Sebagai bagian dari pelayanan perizinan, Kota Semarang juga telah memiliki mekanisme pengaduan proses perizinan yang dapat dilakukan di kantor pengaduan yang menyatu dengan DPM-PTSP Kota Semarang, melalui telepon (024-354-8691 atau SMS ke nomor 081-1275-7425.) maupun secara on line dengan email.

Terkait dengan biaya transaksi, baik dalam bentuk retribusi, pajak daerah, donasi dan lain-lain cenderung dinilai tidak memberatkan.

Akses Lahan

Sebagian besar (78,26%) lahan yang digunakan sebagai tempat usaha adalah milik sendiri dan sebagian yang lain adalah sewa dan lainnya. Sementara itu, jika dilihat dari status hukum kepemilikan tanah, sebagian besar (75%) bersertifikat Hak Miliki (HM), 10% Hak Guna Bangunan (HGB), 5% Hak Guna Usaha (HGU) dan 10% girik. Dengan melihat status hukum lahan tempat usaha tersebut dapat dikatakan bahwa lokasi tempat usaa cenderung terlindungi. Untuk mendapatkan sertifikat tanah cenderung dipersepsikan mudah ke arah sulit (terdapat 40% responden menyatakan sulit), demikian halnya untuk

mendapatkan lahan usaha. Hal penting yang perlu mendapat cukup perhatian adalah mengenai kemungkinan terjadinya pengusuran. Penelitian ini menemukan bahwa responden cenderung berpersepsi lahan usaha mereka mungkin digusur, meskipun sejauh ini sangat jarang terjadi pengusuran. Konflik atau sengketa lahan selama tahun yang diamati juga tidak pernah terjadi. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar status kepemilikan lahan adalah HM.

Interaksi Pemda-Pelaku Usaha dan Program Pengembangan Usaha Swasta

Dalam kenyataannya, Pemda Kota Semarang memiliki beberapa forum komunikasi pelaku usaha dengan pemerintah, diantaranya adalah SEMBIS, dan melalui berbagai asosiasi pengusaha. Namun demikian, pengusaha yang mejadi responden ini cenderung kurang mengetahui adalah forum tersebut, tercermin pada 66.67% responden menyatakan tidak tahu, dan hanya 33,33% responden menyatakan ada. Mengenai kualitas interaksi antara Pemda dengan pengusaha dapat digambarkan sebagai berikut (tabel 3):

Tabel 3 Pemecahan Masalah, Dukungan Pemda dan Kapasitas Walikota

Indikator	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pemecahan Masalah			
Respon Pemda baik	57.89	5.26	36.84
Pemda Menindak lanjuti	42.86	7.14	50.00
Sesuai harapan	38.46	7.69	53.85
Dukungan Pemda			
Konsultasi Publik	21.43	57.14	21.43
Pertemuan Pelaku Usaha	18.18	63.64	18.18
Akses komdan Informasi	12.50	68.75	18.75
Dampak Kebijakan			
Menambah biaya usaha	0.00	82.61	17.39
Jamin keberlangsungan ush	8.70	82.61	8.70
Membuka peluang usaha	0.00	69.57	30.43
Kapasitas dan Integritas Walikota			
Paham persoalan plk ush	11.76	82.35	5.88
Perhatian dan Renstra	7.69	84.62	7.69
Penempatan Pejabat Tepat	16.67	66.67	16.67
Tegas thd korupsi	0.00	75.00	25.00
Tdk Menguntungkan diri sendiri	0.00	85.71	14.29

Sumber: data primer.

Program pengembangan usaha Swasta (PPUS) oleh pemda, dapat dikatakan kurang sampai kelompok sasaran. Sebab, pada kenyataannya pemerintah memiliki berbagai program untuk mengembangkan usaha swasta, namun hal tersebut sedikit diketahui dan dirasakan oleh responden. Dari sedikit yang pernah mengikuti program (pelatihan manajemen bisnis dan bantuan finansial) sangat dirasakan manfaatnya

oleh pengusaha. Pengusaha juga cenderung memiliki penilaian yang baik terkait kapasitas dan integritas Walikota.

Infrastruktur Daerah

Secara keseluruhan, infrastruktur daerah yang meliputi penyediaan air, jalan, lampu penerangan jalan dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi serta sanitasi dan pembuangan limbah di Kota Semarang relatif baik dengan kualitas yang semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, jika terjadi kerusakan pada infrastruktur, pemda cukup tanggap dan cepat dalam merespon kerusakan tersebut namun relatif lambat dalam menindaklanjuti.

Sebagian besar perusahaan di Kota Semarang menggunakan PLN sebagai sumber utama pengadaan listrik. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang besar juga menggunakan genset sebagai cadangan jika listrik padam, meskipun pada dasarnya pemadaman listrik relatif jarang terjadi. Dari beberapa kali terjadi pemadaman listrik di Kota Semarang, responden mengatakan bukan terjadi karena keterbatasan pasokan energi listrik namun karena sambungan yang bermasalah atau pemeliharaan. Sementara itu, terkait dengan pengadaan air, sumber utama air adalah PDAM.

Keamanan dan Resolusi Konflik

Iklim investasi Kota Semarang cukup kondusif dilihat dari variabel keamanan dan penyelesaian konflik. Hal tersebut tercermin pada arah responden menyatakan jarang sekali terjadi tindakan kriminal (pencurian, perampokan, pemerasan, dan lainnya) selama tahun 2015. Mereka mengatakan bahwa daerah tempat usaha merupakan daerah yang aman bahkan sangat aman dari ancaman kriminalitas. Konflik, baik antar pengusaha, antara pengusaha dengan masyarakat juga sangat jarang terjadi.

Ketenagakerjaan

Faktor ketenagakerjaan bukan merupakan faktor yang menghambat perkembangan dunia usaha. Untuk mendapatkan tenaga kerja di Kota Semarang cenderung mudah. Konflik mengenai upah minimum juga tidak pernah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena tripartit (buruh, pengusaha, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) penetapan upah minimum masing-masing berperan aktif meskipun kadang-kadang lama atau “alot” dalam

kesepakatan besarnya kenaikan upah setiap tahunnya.

Posisi Kota Semarang dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2016

Secara keseluruhan, tata kelola ekonomi daerah Kota Semarang sudah baik. Dari 32 kota yang menjadi ibu kota Provinsi yang disurvei dalam pemeringkatan TKED 2016, Kota Semarang menduduki peringkat 3 TKED terbaik di Indonesia dengan indeks sebagai berikut (tabel 4):

Tabel 4 Indeks TKED Kota Semarang 2016

Variabel	Indeks
Perizinan	86.12
Biaya Transaksi	95.47
Akses Lahan	73.36
Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	59.11
PPUS	84.30
Kapasitas dan Integritas Walikota	85.80
Infrastruktur	68.32
Keamanan dan Resolusi Konflik	99.97
Ketenagakerjaan	76.86
Perda	90.05
Indeks Total	78.60

Sumber: TKED 2016, KPPOD.

Dengan memperhatikan indeks TKED tersebut diketahui bahwa variabel yang dinilai sangat baik adalah keamanan dan resolusi konflik, biaya transaksi dan perda yang mendukung investasi. Sementara itu, yang secara relatif kurang baik dibanding variabel lainnya adalah interaksi pemda dengan pelaku usaha, infrastruktur, dan akses lahan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, tata kelola ekonomi daerah Kota Semarang telah baik, terutama dari sisi keamanan dan resolusi konflik, perizinan, dan biaya transaksi. Meskipun tidak dinilai buruk, dalam hal akses dan kepastian hukum atas lahan, interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha, infrastruktur, secara relatif dipersepsikan lebih rendah dibanding variabel yang lain.

SARAN

Berangkat dari temuan tersebut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan tata kelola ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif adalah (1) meningkatkan fasilitasi akses lahan termasuk kepastian hukumnya, termasuk dalam hal *registering property*, (2) sosialisasi program terkait dengan interaksi

antara pemda dan pelaku usaha yang cenderung dinilai relatif rendah, padahal pemerintah memiliki program-program tersebut, dan (3) lebih responsif terhadap keluhan atas infratraktur dengan tindakan nyata serta meningkatkan kualitas infratraktur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, Jakarta) yang telah melibatkan saya dalam survei tata kelola Ekonomi Daerah 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2007). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025*. BAPPENAS. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf
- IFC, T.W.B. (2017). *Doing Business: Measuring Business regulations*. ISBN. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0948-4>
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Imam Gozali. (2006). *SEM metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: BP UNDIP.
- KPPOD. (2017). *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016: Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia* (2017th ed.). Jakarta: KPPOD.
- Mc Culloch, N., & Malesky E. (2010). Does Better Local Government Governance Induce Local Economic Growth Performance in Indonesia? No Title. *Working Paper, KPPOD, Institute of Development Studies, and AusAid*. semarangkota.bps.go.id. Retrieved from <https://semarangkota.bps.go.id/>
- World Bank Group. (2016). *Doing Business - Economy Rankings*. World Bank Group. Retrieved from <http://www.doingbusiness.org/rankings>
- www.bps.go.id